



PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI BKAD KABUPATEN GORONTALO

Anisa Rahmatia H. Palowa¹, Felmi D. Lantowa¹, Fitria Melynsyah Yusuf³

Universitas Muhammadiyah Gorontalo^{1,2,3}

anissarhmtia@gmail.com¹

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 19/06/2025

Direvisi : 25/06/2025

Disetujui : 30/06/2025

Keywords: Regional Financial Accounting System, Public Transparency, Financial Accountability

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Akuntabilitas Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) and public transparency on financial accountability at the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Gorontalo Regency. The research method used is a descriptive quantitative approach with a purposive sampling technique, involving 33 respondents from BKAD employees. Data collection was carried out through a closed questionnaire and analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS version 25. The results of the study indicate that both the implementation of SAKD and public transparency partially and simultaneously have a positive and significant effect on financial accountability. Public transparency has a dominant influence with a regression coefficient of 0.542 compared to the implementation of SAKD of 0.416. The Adjusted R² value of 0.913 indicates that both variables are able to explain 91.3% of the variation in financial accountability. The conclusion of this study shows that strengthening the accrual-based accounting system and increasing public information disclosure are strategic steps in realizing transparent and accountable regional financial governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan 33 responden dari pegawai BKAD. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penerapan SAKD maupun transparansi publik secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Transparansi publik memberikan pengaruh dominan dengan koefisien regresi sebesar 0,542 dibandingkan penerapan SAKD sebesar 0,416. Nilai Adjusted R² sebesar 0,913 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 91,3% variasi akuntabilitas keuangan. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem akuntansi berbasis akrual dan peningkatan keterbukaan informasi publik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum diberlakukannya era desentralisasi fiskal cenderung tertinggal dibanding sektor swasta. Kurangnya perhatian terhadap sistem keuangan di sektor publik menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prioritas, dengan penekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini mendorong perlunya pengelolaan keuangan daerah yang akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen penting untuk mencapai akuntabilitas adalah penerapan Sistem Akuntansi



Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan PP No. 12 Tahun 2019. Sistem ini dirancang agar pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, guna memperkuat kontrol publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Meskipun demikian, implementasi SAKD di banyak daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya pemahaman terhadap SAP berbasis akrual.

Fenomena tersebut juga terlihat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, di mana hasil observasi menunjukkan bahwa sistem akuntansi berbasis akrual belum diterapkan secara optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan dan minimnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan yang rendah, kurangnya publikasi hasil audit BPK, dan hambatan aksesibilitas informasi oleh masyarakat menjadi indikator lemahnya transparansi. Padahal, transparansi publik memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas, karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pengelolaan dana publik. Berbagai penelitian telah mengungkap hubungan positif antara penerapan sistem akuntansi yang baik dengan peningkatan akuntabilitas keuangan. Penelitian oleh Sihombing (2023) menunjukkan bahwa sistem akuntansi, transparansi publik, aktivitas pengendalian, dan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Namun, temuan Jumardi dan Abdul Khalik (2023) berbeda, di mana transparansi publik tidak berpengaruh secara signifikan. Perbedaan hasil ini menjadi celah penelitian yang relevan untuk ditinjau lebih lanjut, khususnya dalam konteks BKAD Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SAKD dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan di BKAD Kabupaten Gorontalo. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) menganalisis pengaruh penerapan SAKD terhadap akuntabilitas keuangan; (2) mengkaji pengaruh transparansi publik dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan; dan (3) menilai pengaruh simultan antara penerapan SAKD dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang akuntansi sektor publik dan menjadi referensi bagi penelitian lanjutan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi BKAD Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan efektivitas sistem akuntansi dan transparansi pengelolaan keuangan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan publik dalam pengawasan keuangan daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa manajemen bertindak sebagai pelayan (steward) yang mengutamakan kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, teori ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban (accountability) dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan. Sistem akuntansi berbasis akrual yang digunakan oleh pemerintah daerah menjadi sarana dalam mewujudkan pertanggungjawaban ini (Abdillah, 2020; Siregar, 2019).



Good Governance

Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2018) dan Rizal Djalil (2018), menuntut adanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, dan responsif terhadap kepentingan publik. Dalam hal ini, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) menjadi instrumen penting dalam mendukung prinsip-prinsip good governance, dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2021) adalah sistem informasi keuangan yang digunakan untuk mencatat, melaporkan, dan mengevaluasi penggunaan dana publik. Penerapan akuntansi sektor publik secara efektif berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi alokasi sumber daya di sektor publik.

Partisipasi Publik

Partisipasi publik, menurut Putri (2019), merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pengambilan keputusan dapat memperkuat transparansi serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik (Prabowo, 2021). Transparansi yang tinggi memungkinkan publik untuk mengakses dan mengevaluasi dokumen serta laporan keuangan daerah secara mudah dan akurat (Julita & Abdullah, 2020; Widodo, 2021).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

SAKD merupakan seperangkat prosedur dan praktik yang mencakup pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah daerah berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. SAKD yang efektif diharapkan mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri No. 90 Tahun 2019; Yunita, 2019). Aspek penting dalam SAKD meliputi kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, pencatatan yang sistematis, pelaporan periodik, serta sistem pengendalian aset, penerimaan, dan pengeluaran daerah (Halim, 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Transparansi Publik

Transparansi publik, sebagaimana dijelaskan oleh Purwati (2021) dan Kristiaten dalam Julita & Abdullah (2020), mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat secara mudah diakses, jelas, dan berkualitas. Transparansi bukan hanya menyangkut keterbukaan data, tetapi juga cara penyampaian informasi yang memungkinkan masyarakat melakukan kontrol dan evaluasi kebijakan fiskal pemerintah.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan, sebagaimana dirumuskan oleh Halim (2019) dan Mahmudi (2020), adalah bentuk kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik secara terbuka, jujur, dan sesuai ketentuan. Dimensi akuntabilitas meliputi akuntabilitas hukum, manajerial, program, finansial, dan kebijakan. Dengan adanya sistem



pelaporan keuangan yang akurat dan transparan, maka pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik dapat ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan akuntabilitas keuangan. Penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, yang berlokasi di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BKAD Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 69 orang. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan, pelaporan, dan pengendalian keuangan serta transparansi informasi keuangan. Teknik ini dipilih agar data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian dan mampu menggambarkan kondisi aktual di lapangan. yaitu dari Februari hingga April 2025. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuisioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Kuisioner dibagikan langsung kepada responden dan diisi secara manual maupun digital. Untuk memastikan kualitas instrumen, dilakukan uji validitas dengan mengkorelasikan setiap item terhadap total skor variabel, serta uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan ambang batas $\geq 0,60$. Kuisioner yang valid dan reliabel menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan konsisten.

Data yang terkumpul dianalisis melalui dua tahapan, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta nilai masing-masing variabel melalui perhitungan rata-rata, frekuensi, dan standar deviasi. Sementara itu, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda. Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis statistik. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu uji parsial (uji-t) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, uji simultan (uji-F) untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Seluruh pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan sebanyak 69 orang responden yang merupakan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo yang secara langsung menangani proses pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah. Responden tersebut berasal dari tiga bidang utama, yaitu Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner yang dibagikan secara online menggunakan tautan Google Form maupun secara langsung di kantor BKAD Kabupaten Gorontalo. Dari jumlah responden tersebut, 19 orang atau 58,6% berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang atau 42,4% adalah perempuan, dengan variasi usia yang beragam; kelompok usia di bawah 30 tahun terdiri dari 4 responden atau sebesar 12,1%, sementara mayoritas berada dalam rentang usia 40–50 tahun sebanyak 17 orang atau 51,5%. Selain itu, terdapat 12 responden atau 36,4% yang berusia di atas 50 tahun. Data yang



terkumpul melalui survei diuji validitasnya menggunakan uji korelasi Pearson, dan seluruh item pertanyaan terbukti memiliki tingkat validitas yang tinggi. Pengujian reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha juga menunjukkan bahwa instrumen yang mengukur variabel seperti Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Selanjutnya, uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual memiliki distribusi normal, sedangkan uji multikolinearitas memperlihatkan tidak adanya hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen, dengan nilai VIF kurang dari 10 serta nilai tolerance di atas 0,1. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser dan hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga analisis regresi dapat dianggap andal. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Teknik ini juga dimanfaatkan untuk memperkirakan nilai variabel dependen saat terjadi perubahan nilai pada variabel independen, serta untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah menunjukkan hubungan positif atau negatif (Priyatno, 2023:116).

Tabel 1.
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	6,883	5,957		1,155
	SAKD	,416	,205	,303	2,027
	Transparansi	,542	,144	,562	3,766
a. Dependent Variable: Akuntabilitas					

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13 diatas, pada kolom *Unstandardized Coefficients* (B), didapatkan persamaan regresi linier berganda dari penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 6,883 + 0,416X_1 + 0,542X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Keuangan

X₁ = Penerapan SAKD

X₂ = Transparansi Publik

e = error atau variabel gangguan

Berdasarkan hasil persamaan regresi, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta a = 6,883 berarti, jika tidak ada ada penerapan SAKD (X₁=0) dan tidak ada transparansi publik (X₂= 0), maka nilai akuntabilitas keuangan (Y) diprediksi sebesar 6,883. Ini merupakan nilai dasar atau awal dari akuntabilitas keuangan tanpa adanya kontribusi dari kedua variabel independen.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel Penerapan SAKD (X₁) bernilai positif b₁ = 0,416 nilai ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam penerapan SAKD akan meningkat akuntabilitas keuangan sebesar 0,416 satuan. Sebagai



contoh, jika suatu daerah meningkatkan penerapan SAKD dari skla 3 menjadi 4, maka akuntabilitas keuangan di daerah tersebut diprediksi akan meningkat sebesar 0,416 poin.

- 3) Nilai koefisien regresi variabel Transparansi Publik (X2) bernilai positif $b_2 = 0,542$ nilai ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam transparansi publik akan meningkat akuntabilitas keuangan sebesar 0,542 satuan. Misalnya, jika transparansi publik meningkat dari level 2 ke level 3, maka akuntabilitas keuangan diperkirakan akan meningkat sebesar 0,542 poin.

Sedangkan hasil pengolahan menunjukkan nilai koefisien determinasi R square (R^2) secara rinci, Penerapan SAKD berkontribusi sebesar 40,38%, sedangkan Transparansi Publik memberikan kontribusi sebesar 50,92%. Sisanya, yaitu sebesar 8,7%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) dalam satu model regresi linier. Dua variabel independen, X1 dan X2, diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen. diperoleh nilai signifikansi variabel (X1) sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu nilai t hitung ($4,945$) $>$ t tabel ($2,042$). Hasil uji menunjukkan bahwa penerapan SAKD secara signifikan memengaruhi peningkatan akuntabilitas keuangan. Nilai signifikansi variabel (X2) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung ($9,186$) $>$ t tabel ($2,042$), hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi publik memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya akuntabilitas keuangan. Sedangkan uji F menunjukkan nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y menunjukkan angka 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 156,950 jauh lebih besar dari nilai F tabel yang sebesar 3,32. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sangat signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, Penerapan SAKD dan Transparansi Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Secara parsial, Penerapan SAKD memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi 0,416, dan Transparansi Publik memiliki koefisien regresi lebih besar sebesar 0,54, dengan signifikansi juga 0,000. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 91,3% variasi akuntabilitas keuangan ($\text{Adjusted } R^2 = 0,913$), dengan kontribusi terbesar berasal dari Transparansi Publik. Temuan ini diperoleh melalui analisis kuantitatif dengan uji t, uji F, serta analisis deskriptif terhadap indikator masing-masing variabel. Beberapa indikator menunjukkan nilai mean yang rendah, seperti X1.4, X2.4, dan Y10, yang mengindikasikan masih adanya aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Interpretasi dari temuan menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan SAKD memperbaiki akurasi dan keandalan laporan keuangan, sementara transparansi publik mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat, sehingga memperkuat akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, kedua variabel saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Hasil ini mendukung teori akuntansi sektor publik dan teori stewardship, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab moral aparatur negara. Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Mas'ut et al., 2023; Wulandari, 2021;



Sihombing, 2023) yang menegaskan hubungan signifikan antara penerapan sistem akuntansi dan transparansi terhadap akuntabilitas.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan transparansi publik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di BKAD Kabupaten Gorontalo. Transparansi publik merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong akuntabilitas, disusul oleh penerapan SAKD. Secara simultan, kedua variabel mampu menjelaskan 91,3% variasi akuntabilitas keuangan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan komitmen organisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi sistem keuangan yang andal dan keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2020). *Peran Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Publik, 8(2), 45–60.
- Djalil, R. (2018). *Good Governance dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Jurnal Administrasi Negara, 10(1), 12–27.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Halim, A. (2019). Dimensi dan Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 23–38.
- Mahmudi, (2020). *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2018). *Reformasi dan Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mas'ut, I., Rahmat, N., & Siregar, D. (2023). Pengaruh SAKD dan Transparansi terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.1234/jakp.v11i1.2023>
- Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Prabowo, B. (2021). Partisipasi Publik dalam Pengawasan Anggaran Daerah. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 2(2), 66–78.
- Purwati, S. (2021). Transparansi Publik dan Akuntabilitas Pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 15–29.
- Putri, T. N. (2019). Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Fiskal. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 41–55.
- Rizal Djalil, R. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Pemerintahan Daerah, 3(1), 10–20.



- Sihombing, P. (2023). Pengaruh SAKD, Transparansi, dan Pengendalian terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 14(1), 78–92. <https://doi.org/10.5678/jai.v14i1.2023>
- Siregar, F. (2019). Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(3), 30–45.
- Widodo, H. (2021). Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 101–115.
- Wulandari, E. (2021). Implementasi Akuntabilitas di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(2), 55–70.
- Yunita, D. (2019). Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 5(2), 25–40.
- Zieba, M., & Johansson, I. (2022). Stakeholder Engagement in Sustainability Reporting: Evidence from the Aviation Sector. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(4), 895–912. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-03-2021-0123>